

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2025**

**PROGRAM 3 JUTA RUMAH DI
KABUPATEN JOMBANG**



**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KAB JOMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagai informasi capaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan, baik keberhasilan maupun kendala pelaksanaan program kegiatan yang diuraikan secara transparan dalam Laporan Kinerja ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus menyusun Laporan Kinerja yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Adapun penyusunan laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2025 ini, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga saran atau masukan sangat diperlukan guna penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Jombang, 31 Desember 2025

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JOMBANG



SYAIFUL ANWAR, ST. ME.

Pembina Tk. I

NIP. 197803192005011015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Ikhtisar Eksekutif iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tugas dan Fungsi 2

1.3 Struktur Organisasi 2

1.4 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah 11

1.5 Isu Strategis 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

2.1 Perencanaan Strategis..... 15

2.2 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 19

2.3 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 25

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 25

3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi dari tahun ke tahun..... 25

3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 29

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 tahun terakhir..... 33

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka
menengah 34

3.2 Realisasi anggaran 36

3.3 Analisis penyebab peningkatan & penurunan Kinerja..... 45

3.4 Pengarusutamaan Gender (PUG) 45

BAB IV PENUTUP 48

4.1 Permasalahan..... 48

4.2 Rekomendasi..... 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3	Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman.....	3
Tabel 2.1.1	Target Renstra 2024-2026 Dinas Perumahan dan Permukiman	17
Tabel 2.1.2	Target Renstra 2025-2029 Dinas Perumahan dan Permukiman	17
Tabel 2.1.3	Arah Kebijakan dan Strategi.....	18
Tabel 2.2.1	Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2025.....	19
Tabel 2.2.2	Perubahan Target Program Tahun 2025	20
Tabel 2.2.3	Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025	21
Tabel 2.2.4	Perjanjian Kinerja Program Tahun 2025.....	21
Tabel 2.3.1	Perubahan pagu anggaran Tahun 2025-2026	22
Tabel 2.3.2	Perubahan Target anggaran Tahun 2025-2026.....	23
Tabel 2.3.3	Perjanjian Kinerja sasaran strategis Tahun 2026.....	23
Tabel 2.3.4	Perjanjian Kinerja program Tahun 2025	24
Tabel 3.1.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.....	25
Tabel 3.1.2	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun terakhir.....	29
Tabel 3.1.3	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah.....	33
Tabel 3.1.4	Kinerja Kementerian PUPR 2025.....	34
Tabel 3.1.5.1	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tahun 2022-2025.....	35
Tabel 3.1.5.2	Target Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025.....	36
Tabel 3.2.1	Perbandingan realisasi kinerja dengan anggaran Tahun 2025	36
Tabel 3.2.2.1	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Program	38
Tabel 3.2.2.2	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis	39
Tabel 3.2.2.3	Analisis Jabatan Pegawai tahun 2025.....	40
Tabel 3.2.2.4	Efisiensi Sarana dan Prasarana.....	42
Tabel 3.2.2.5	Perbandingan Sarpras Kantor dengan Anjab dan Capaian Kinerja	45
Tabel 3.4.1	Analisis Situasi PUG Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025	46

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2025, dari capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran yang menginformasikan keberhasilan, kendala, evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di perumahan dan kawasan permukiman;

Indikator pencapaian Kinerja Tahun 2025 adalah dengan membandingkan target dengan realisasi pelaksanaan yang dituangkan dalam persentase (%) capaian kinerja. Jika dibandingkan dengan indikator kinerja tahun sebelumnya, capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2025 lebih meningkat dan berorientasi pada hasil.

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang tahun 2025 meliputi:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Kawasan Permukiman;
5. Program Pengembangan Perumahan;
6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Capaian Indikator Kinerja yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan *action plan* yang relevan. Untuk itu, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Jombang, 31 Desember 2025

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JOMBANG



SYAIFUL ANWAR, ST. ME.

Pembina Tk. I

NIP. 197803192005011015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang pelaksanaan tugas, pencapaian kinerja, serta dampak program yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tugas ini mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan serta evaluasi di sektor perumahan, serta penyediaan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan. Kinerja Dinas menjadi ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pengembangan kawasan permukiman dan penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. RPJMD Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan tersebut mengusung visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”, sebagai arah pembangunan daerah lima tahunan yang menjadi landasan utama dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah. Visi ini menjadi titik tolak dalam merumuskan misi pembangunan daerah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan infrastruktur, ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal, serta transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka, kolaboratif, akuntabel dan bersih dari korupsi.

Selaras dengan visi–misi tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman menyusun strategi, program, dan indikator kinerja yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek penyediaan perumahan yang layak dan pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dinas juga memperhatikan prinsip inklusivitas, pemerataan manfaat pembangunan antar wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

LKjIP Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja serta penyusunan rencana kerja selanjutnya. Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang capaian kinerja Dinas dalam mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Jombang yang berorientasi kepada kemajuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman

Peraturan Bupati Jombang No. 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

Kedudukan

1. Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Dinas Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di perumahan dan kawasan permukiman;

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Perumahan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Unit Pelaksana Teknis
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan susunan organisasi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang, susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagaimana bagan dibawah ini:

Tabel 1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	JABATAN	TUGAS	
1	KEPALA DINAS	Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang Perumahan dan Permukiman.	
		FUNGSI	
		1	Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
		2	Melaksanakan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
		3	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
		4	Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Permukiman
		5	Penyelenggaraan fungsi–fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman
		6	Pembinaan penyelenggaraan fungsi–fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman
		7	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati
NO	JABATAN	TUGAS	
2	SEKRETARIS	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.	
		FUNGSI	
		1	Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
		2	Pengelolaan administrasi kepegawaian
		3	Pengelolaan administrasi keuangan
		4	Pengelolaan administrasi perlengkapan
		5	Pengelolaan administrasi aset
		6	Pengelolaan urusan rumah tangga
		7	Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang–undangan
		8	Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
		9	Pengelolaan kearsipan
		10	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
		11	Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil Negara
		12	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
NO	JABATAN	FUNGSI	
2	a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	1	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional sesuai dengan kebijakan nasional dan propinsi
		2	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas – tugas organisasi dan tata laksana aparatur
		3	Menyelenggarakan kegiatan–kegiatan protoler, pertemuan dan rapat– rapat penerimaan tamu

NO	JABATAN	FUNGSI	
		4	Menyelenggarakan kegiatan urusan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan
		5	Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan ketatausahaan serta perlengkapan kantor
		6	Melaksanakan pengelolaan asset
		7	Melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan
		8	Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor
		9	Mengatur dan mengelola barang inventaris dan asset kantor
		10	Melaksanakan penatanausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi / pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran
		11	Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, perpindahan pegawai, gaji pegawai dan pembayaran hak – hak keuangan lainnya
		12	Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran
		13	Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran
		14	Melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai
		15	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
NO	JABATAN	FUNGSI	
2	b. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Penyusunan Program dan Evaluasi	1	Menghimpun, mengelola, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran
		2	Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan
		3	Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan kegiatan anggaran
		4	Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penelitian pelaksanaan program dan anggaran
		5	Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman
		6	Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
		7	Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
		8	Mengelola mengembangkkan data dan system informasi
		9	Melaksanakan supervise, pelaporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan
		10	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
NO	JABATAN	TUGAS	
3	BIDANG PERUMAHAN	Melaksanakan sebagian tugas perumahan dan permukiman di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan	

		FUNGSI	
		1	Perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		2	Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		3	Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		4	Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		6	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
NO	JABATAN	FUNGSI	
3	a. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Pendataan Perencanaan, Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Umum	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan
NO	JABATAN	FUNGSI	
3	b. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Pendataan Perencanaan, Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah swadaya
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah swada
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah swadaya
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah swadaya

		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah swadaya
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah swadaya
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan
NO	JABATAN	FUNGSI	
3	c. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan dibidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemantauan umum dan swadaya
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait dibidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		6	Melaksanakan pelaporan kegiatan dibidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan
NO	JABATAN	TUGAS	
4	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis	
		FUNGSI	
		1	Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis
		2	Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis
		3	Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis
		4	Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis
		5	Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis
		6	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	JABATAN	FUNGSI	
4	a. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Kawasan Perkotaan	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		3	Penyusunan petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
NO	JABATAN	FUNGSI	
4	b. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Kawasan Pedesaan	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		3	Penyusunan petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait dibidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
NO	JABATAN	FUNGSI	
4	c. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Kawasan Khusus dan Kawasan Strategis	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		3	Penyusunan petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait dibidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

NO	JABATAN	TUGAS	
5	BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman dibidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik, dan drainase.	
		FUNGSI	
		1	Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik, dan drainase
		2	Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik, dan drainase
		3	Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dibidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik, dan drainase
		4	Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dibidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik, dan drainase
		5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik, dan drainase
		6	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
NO	JABATAN	FUNGSI	
5	a. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Air Bersih	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan air bersih
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan dibidang pengelolaan air bersih;
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang pengelolaan air bersih
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengelolaan air bersih
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait dibidang pengelolaan air bersih
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengelolaan air bersih
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
NO	JABATAN	FUNGSI	
5	b. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Air Limbah Domestik	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan air limbah domestik
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan dibidang pengelolaan air limbah domestik
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang pengelolaan air limbah domestik
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengelolaan air limbah domestik
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait dibidang pengelolaan air limbah domestik
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengelolaan air limbah domestik
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

NO	JABATAN	FUNGSI	
5	c. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Drainase	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan drainase lingkungan
		2	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan drainase lingkungan
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang pengelolaan drainase lingkungan
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengelolaan drainase lingkungan
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait dibidang pengelolaan drainase lingkungan
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengelolaan drainase lingkungan
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG**



1. **Mandat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang**

Mandat utama Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) Kabupaten Jombang

adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Ini mencakup penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, evaluasi, pembinaan, serta pelaporan berkaitan dengan pengembangan perumahan dan permukiman sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah

Visi dan Misi Dinas (Renstra 2024–2026 / dasar perencanaan saat ini):

Visi: *Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing*

Misi: *Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri*

Tujuan Utama: *Meningkatnya kualitas kawasan permukiman*

Visi ini perlu diintegrasikan dan diselaraskan dengan **RPJMD periode 2025-2029** yang ditetapkan Bupati Jombang (mengusung visi “*Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua*”).

2. **Peran Strategis Dinas dalam Konteks Visi & Misi Bupati 2025-2029**

Visi Bupati Jombang “*Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua*” dibangun melalui lima misi strategis:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Pembangunan kemandirian ekonomi berkelanjutan.
3. Pembangunan infrastruktur yang merata, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
4. Ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal.
5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan kolaboratif

Peran Dinas PERKIM terkait visi misi Bupati:

a. Mendukung Infrastruktur Permukiman yang Merata dan Berkeadilan

- Menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman (akses sanitasi layak, air minum layak, drainase, rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh).
- Menjadi ujung tombak pembangunan infrastuktur dasar di sektor permukiman yang inklusif, berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- Menjamin kebutuhan fasilitas permukiman di wilayah desa dan kota mendapatkan perhatian merata, mendukung pembangunan berkeadilan seperti tertuang dalam misi pembangunan RPJMD.

b. Meningkatkan Kolaborasi Antar OPD dan Partisipasi Publik

- Bekerja bersama perangkat daerah lain sesuai strategi kolaboratif *Astacita* dalam RPJMD, misalnya dengan Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bappeda untuk integrasi perencanaan infrastuktur permukiman berwawasan lingkungan.

- Mendukung kolaborasi dalam implementasi program pembangunan permukiman berbasis data dan partisipasi masyarakat.

c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

- Mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan berbasis kinerja.
- Meningkatkan transparansi pelayanan publik di bidang perumahan dan permukiman (pelayanan administrasi, pengawasan, dan manajemen program) untuk menegakkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil, sesuai arah misi ke-5 RPJMD.

d. Mendorong Ketahanan Sosial dan Ekonomi Lokal

- Program permukiman menjadi bagian dari lingkungan yang kuat dan berdaya, mendukung ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal salah satu misi RPJMD.
- Ini terwujud melalui pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan permukiman, perbaikan rumah mandiri, dan keterlibatan komunitas dalam pemeliharaan fasilitas umum.

3. Strategi Utama

Untuk menerjemahkan mandat sesuai RPJMD 2025-2029, strategi strategis Dinas PERKIM dapat mencakup:

□ **Integrasi perencanaan berbasis RPJMD**

Menyelaraskan Renstra Dinas dengan RPJMD periode 2025-2029, termasuk indikator kinerja yang menggambarkan kontribusi terhadap setiap misi Bupati.

□ **Penguatan standar layanan permukiman**

Meningkatkan kualitas layanan perumahan layak huni, akses sanitasi, air minum, drainase, dan pengentasan kawasan kumuh melalui skala prioritas yang terukur.

□ **Optimalisasi kolaborasi multi-sektor**

Meningkatkan koordinasi dengan OPD lain, kecamatan, lembaga masyarakat, dan pihak swasta untuk meningkatkan efektivitas program.

□ **Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi**

Mengembangkan pendekatan partisipatif melalui forum masyarakat, musrenbang kecamatan, dan kelompok penerima manfaat program.

□ **Penguatan monitoring & evaluasi berbasis data**

Meningkatkan sistem pelaporan kinerja dan dashboard indikator untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dan evaluasi berkala.

Secara keseluruhan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Jombang **memilikimandat untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman sekaligus menjadi pendorong capaian visi Bupati untuk mewujudkan Jombang yang *Maju dan Sejahtera untuk Semua* melalui program dan layanan yang inklusif, adaptif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan**

1.6 ISU-ISU TRATEGIS

1.5.1 Permasalahan di Bidang Perumahan

- 1.6.1.1 Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan yang kurang memenuhi kebutuhan operasional dinas;
- 1.6.1.2 Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur;
- 1.6.1.3 Tingginya rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan Rendah 5.406 RT/KK (1,35%);
- 1.6.1.4 Tidak meratanya sebaran kondisi RTLH di tiap kecamatan, sehingga menimbulkan kesenjangan dan membutuhkan perencanaan penanganan yang lebih mengedepankan skala prioritas;
- 1.6.1.5 Banyaknya perumahan dan kawasan perumahan yang belum tertata Prasarana dan Sarana Utilitasnya yang disebabkan masih dalam tanggung jawab pengembang;
- 1.6.1.6 Banyak perumahan yang aset prasarana umumnya belum diserahkan ke Pemerintah Daerah, sehingga belum bisa tertangani prasarana umumnya;
- 1.6.1.7 Kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat penghuni perumahan untuk mendapatkan perumahan dan kawasan perumahan dengan PSU yang layak dan asri bagi hunian masyarakat;
- 1.6.1.8 Evaluasi pada akhir pembangunan terhadap kondisi dan manfaat infrastruktur yang terbangun.

1.6.2 Permasalahan di Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum

- 1.6.2.1 Tingginya rumah tangga dengan sanitasi belum layak di Kabupaten Jombang sebanyak 53.437 RT/KK (13,30%) membutuhkan strategi penanganan yang mengedepankan skala prioritas, karena merupakan kebutuhan dasar sedangkan kemampuan cakupan penanganan sangat terbatas;
- 1.6.2.2 Updating data kesinambungan untuk pembangunan/pelayanan penyediaan sanitasi bisa proposional sesuai dengan prioritas;
- 1.6.2.3 Daerah rawan air bersih yang telah ditetapkan yaitu 8 kecamatan, 5 di Utara Brantas dan 3 di luar Utara Brantas yang membutuhkan penanganan yang berbeda satu sama lain. Misalkan, di Utara Brantas kondisi sumber air yang sangat terbatas untuk eksplorasi membutuhkan tenaga ahli geolistik khusus untuk menentukan serta banyaknya infrastruktur yang cenderung menutup resapan air seperti banyaknya bangunan dan jalan tidak menyediakan lahan resapan;
- 1.6.2.4 Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penurunan kondisi alam yang terus meningkat, sedangkan kebutuhan air bersih juga semakin tinggi;
- 1.6.2.5 Semakin tinggi debit air yang masuk di drainase perkotaan, karena semakin berkurangnya lahan resapan perkotaan;

- 1.6.2.6 Semakin tinggi air hujan yang masuk di jaringan irigasi karena hutan yang semakin gundul dan resapan terus berkurang, menyebabkan jaringan irigasi tidak bisa menampung air hujan. Hal ini berdampak pada tingginya genangan perkotaan akibat air di drainase tidak bisa tertampung pada saluran irigasi;
- 1.6.2.7 Merubah pola pikir pembangunan drainase, serta masyarakat untuk dapat menyediakan resapan pada perencanaan drainase perkotaan dan masing– masing rumah tangga dengan desain yang menyesuaikan;
- 1.6.2.8 SID perencanaan perlu selalu *update* tiap tahun untuk menghindari perubahan kondisi penataan permukiman perkotaan;
- 1.6.2.9 Evaluasi pada akhir pembangunan terhadap kondisi dan manfaat infrastruktur yang terbangun.

1.5.3. Permasalahan diBidang Pengembangan Kawasan Permukiman

- 1. Telah ditetapkan kawasan kumuh dengan Surat Keputusan Bupati No:188.4.45/318/415.10.1.3/2020 Tahun 2020 dengan 9 kecamatan, 37 desa, 474.71 Ha merupakan tantangan bagi Dinas Perumahan dan Permukiman untuk menyelesaikan/tertangani hingga tahun 2028; ada sk baru
- 2. Pencegahan kawasan kumuh dengan pembangunan kawasan pedesaan, perkotaan dan kawasan khusus dengan penetapan infrastruktur yang tidak tumpang tindih dengan tupoksi OPD
- 3. Pencegahan kawasan kumuh dengan pembangunan kawasan tidak akan berhasil jika tidak terkoneksi dengan program pembangunan penataan bangunan perkotaan sesuai dengan penetapan tata ruang pada pemangku kepentingan pada OPD lain;
- 4. Update data kawasan yang berkelanjutan agar pembangunan kawasan pencegahan kawasan kumuh tidak spasial;
- 5. Evaluasi pada akhir pembangunan terhadap kondisi dan manfaat infrastruktur yang terbangun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2025

Perencanaan strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2025 disusun sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Perencanaan ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta kebijakan nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Strategi pembangunan tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perumahan dan permukiman, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai. Hal ini sejalan dengan upaya pengurangan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jombang menetapkan strategi utama berupa penguatan perencanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, strategi juga diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Strategi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta pengelolaan PSU perumahan agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta memperhatikan aspek lingkungan dan ketahanan wilayah. Melalui perencanaan strategi yang terarah dan terukur, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jombang berkomitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2025. Pelaksanaan strategi ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya Kabupaten Jombang yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bupati Kabupaten Jombang periode yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang 2025- 2029, Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu OPD yang mendukung Bupati Jombang di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

dibidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pengawasan di bidang rumah umum, rumah swadaya, perumahan dan kawasan permukiman, serta penyediaan prasarana sarana utilitas umum pada tingkat kabupaten sesuai perundang-undangan dan mendukung tujuan dan sasaran Pejabat Bupati Kabupaten Jombang.

Tujuan IV :

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam Sasaran, yaitu;

Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

Sedangkan Dinas Perumahan dan Permukiman mengampu:

Tujuan : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Indikator

: Indek infrastruktur Permukiman (IIP)

Pelaksanaan kinerjanya dalam mencapai IKU dan IKD di dukung dari

1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2. DINAS KESEHATAN
3. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5. PERUMDA TIRTA KENCANA

Sedangkan pelaksanaannya Dinas Perumahan dan Permukiman menetapkan Sasaran; Meningkatnya kualitas infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, kawasan kumuh dan hunian layak dengan indikator sasaran;

1. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak
2. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak
3. Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik
4. Pesentase Penanganan kawasan kumuh
5. Persentase rumah layak huni

Di implementasikan dalam program;

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Kawasan Permukiman;
5. Program Pengembangan Perumahan;
6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.1.1 Target Renstra 2024-2026 dan 2025- 2029 Dinas Perumahan dan Permukiman

Tabel 2.1.1 Target Renstra 2024-2026 Dinas Perumahan dan Permukiman

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
			2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90,57 %	89,67%	89,77%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1,04%	0,95%	0,96%
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86,68 %	86,78%	87,08%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	2,19%	2,21%	2,26%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	54,30 %	58,04%	66,46%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Tertehabillitasi	9,74%	6,98%	14,52%
		Pesentase Penanganan kawasan kumuh	44,29 %	69,24%	84,85%
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase rumah layak huni	98,52 %	98,43%	98,55%
	Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	7,76%	7,34%	7,93%
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6,40%	8,25%	8,99%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,87	80,87	80,87
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel 2.1.2 Target Renstra 2025-2029 Dinas Perumahan dan Permukiman

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas infrastruktur sanitasi, air minum, drainase, kawasan kumuh dan hunian layak		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	87,00%	87,29%	87,59%	87,89%	88,19%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	2,25%	2,30%	2,35%	2,41%	2,47%
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90,87%	90,93%	90,99%	91,06%	91,12%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1,08%	0,68%	0,69%	0,69%	0,70%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	64,81%	68,71%	72,83%	77,32%	81,80%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Tertehabillitasi	12,80%	11,07%	13,16%	16,52%	19,77%
		Persentase Penanganan kawasan kumuh	51,58%	54,53%	57,48%	60,43%	63,38%
Meningkatnya penanganan area kawasan permukiman	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dokumen RP2KPKPK dan RKP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Rumah Layak Huni	98,82%	98,43%	98,55%	98,55%	98,55%
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
	Progra Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase RTLH yang Telah dibangun	1,85%	1,98%	2,11%	2,26%	2,41%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase PSU Perumahan yang tertangani	7,10%	7,70%	8,30%	9,10%	10,00%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	77,91%	77,91%	77,91%	77,91%	77,91%
		Presentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Perjanjian kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan beserta dengan indikator kinerja. Sehingga, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, wewenang, dan sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan PK adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan perlu dicapai oleh penerima amanah;
2. Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Wujud nyata komitmen penerima dan pemberi amanah guna meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur Sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; serta
5. Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah.

Target dalam perjanjian kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut. Target perjanjian kinerja awal ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun berjalan. Jumlah anggaran yang dialokasikan dalam perjanjian kinerja untuk mencapai target adalah jumlah yang didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran. Berikut adalah pagu anggaran sebelum dan sesudah pergeseran:

Tabel 2.2.1 Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU	PAGU PAK
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.600.000.000	2.721.575.643
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.775.000.000	7.206.792.275
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.944.112.500	3.944.112.500
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.103.252.903	7.000.640.438
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	941.091.500	989.296.675

6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	14.345.330.732	22.557.159.797
7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.942.311.800	4.296.734.300
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	903.308.000	1.878.744.500
TOTAL		42.167.278.516	54.810.630.459

Pagu anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman mengalami pergeseran, sehingga terjadi peningkatan anggaran pada tujuh program. Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum meningkat Rp.1.121.575.643; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah meningkat Rp. 431.792.275; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang Rp. (97.612.465); Program Pengembangan Perumahan meningkat Rp. 48.205.175; Program Kawasan Permukiman meningkat Rp.8.211.829.065; Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh meningkat Rp. 1.354.422.500; serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) meningkat Rp. 975.436.500.

Tabel 2.2.2 Perubahan Target Program Tahun 2025

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Target PAK
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1,05	1,35
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	2,25%	0,75%
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	12,80%	12,80%
4	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100%	100%
5	Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%	100%
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	9,25%	2,11%
7	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	7,10%	7,10%
8	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%

Tabel 2.2.3 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90,59%
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86,79%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	64,81%
		Persentase Penanganan kawasan kumuh	51,58%
		Persentase rumah layak huni	98,65%
2	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,92

Tabel 2.2.4 Perjanjian Kinerja Program Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya penyediaan air minum layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1,35 %	2.721.575.643
2	Meningkatnya pemenuhan sanitasi layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	0,75%	7.206.792.275
3	Meningkatnya jaringan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	12,80%	8.154.686.831
4	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100%	7.005.640.438
5	Terfasilitasinya rumah korban bencana dan relokasi program kab	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%	989.296.675
6	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100%	22.557.159.797
7	Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses RTLH	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah dibangun	2,11%	4.296.734.300
8	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	7,10%	1.878.744.500

2.3 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Perjanjian kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan beserta dengan indikator kinerja. Sehingga, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, wewenang, dan sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan PK adalah:

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan perlu dicapai oleh penerima amanah;
- 2. Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- 3. Wujud nyata komitmen penerima dan pemberi amanah guna meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, Sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 4. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; serta
- 5. Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah.

Target dalam perjanjian kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut. Target perjanjian kinerja awal ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun berjalan. Jumlah anggaran yang dialokasikan dalam perjanjian kinerja untuk mencapai target adalah jumlah yang didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran. Berikut adalah pagu anggaran sebelum dan sesudah pergeseran:

Tabel 2.3.1 Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2025 dan 2026

NO	PROGRAM	PAGU 2025	PAGU 2026
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.721.575.643	389.896.250
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.206.792.275	298.369.100
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8.154.686.831	502.587.500
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.005.640.438	6.447.346.952
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	989.296.675	349.520.170
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	22.557.159.797	3.871.618.337
7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.296.734.300	2.490.729.500
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.878.744.500	279.138.480
TOTAL		54.810.630.459	14.629.206.289

Pagu anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2026 di banding tahun 2025 mengalami penurunan, sehingga terjadi pengurangan anggaran pada tujuh program. Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menurun Rp. -2.331.679.393; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah menurun Rp. -6.908.423.175; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang Rp. -558.293.486; Program Pengembangan Perumahan menurun Rp. -639.776.505; Program Kawasan Permukiman menurun Rp. -18.685.541.460; Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh menurun Rp. -1.806.004.800; serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) menurun Rp. – 1.599.606.020. Sehingga secara keseluruhan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman mengalami penurunan Rp. -40.181.424.170 (73,31%)

Tabel 2.3.2 Perubahan Target Program Tahun 2025 dan Tahun 2026

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET 2026
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1,35%	0,07%
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	0,75%	0,02%
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	12,80%	19,10%
4	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100%	100%
5	Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%	100%
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	2,11%	1,99%
7	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	7,10%	7,69%
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%

Tabel 2.3.3 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90,94%
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86,81%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	83,50%
		Pesentase Penanganan kawasan kumuh	62,68%
		Persentase rumah layak huni	98,71%
2	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,92

Tabel 2.3.4 Perjanjian Kinerja Program Tahun 2026

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya penyediaan air minum layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	0,07%	389.896.250
2	Meningkatnya pemenuhan sanitasi layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	0,02%	298.369.100
3	Meningkatnya jaringan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terteabilitas	19,10%	502.587.500
4	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100%	6.447.346.951
5	Terfasilitasinya rumah korban bencana dan relokasi program kab	Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%	349.520.170
6	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	1,99%	3.871.618.337
7	Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses RTLH	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	7,69%	2.490.729.500
8	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	100%	279.138.480

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas infrastruktur sanitasi, air minum, drainase, Kawasan kumuh dan hunian layak		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86,79%	86,80%	100,01%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	0,75%	0,83%	110,67%
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90,89%	90,93%	100,04%
	Pengelolaan Dan Pengembangan Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah mendapatkan Akses Air Minum Layak	1,35%	1,82%	134,81%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	64,81%	77,48%	119,55%
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan yang terrehabilitasi	12,80%	49,45%	386,33%
	Meningkatnya penanganan	Pesentase penanganan Kawasan kumuh	51,58%	59,84%	116,01%
	areal kawasan permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100,00%	100,00%	100,00%
	Program Pengembangan	Persentase rumah layak huni	98,68%	98,69%	100,01%
	Program Pengembangan perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%
	Program perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase RTLH yang telah dibangun	1,85%	2,37%	128,11%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	7,10%	7,10%	100,00%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,92	77,91	99,99%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,00%

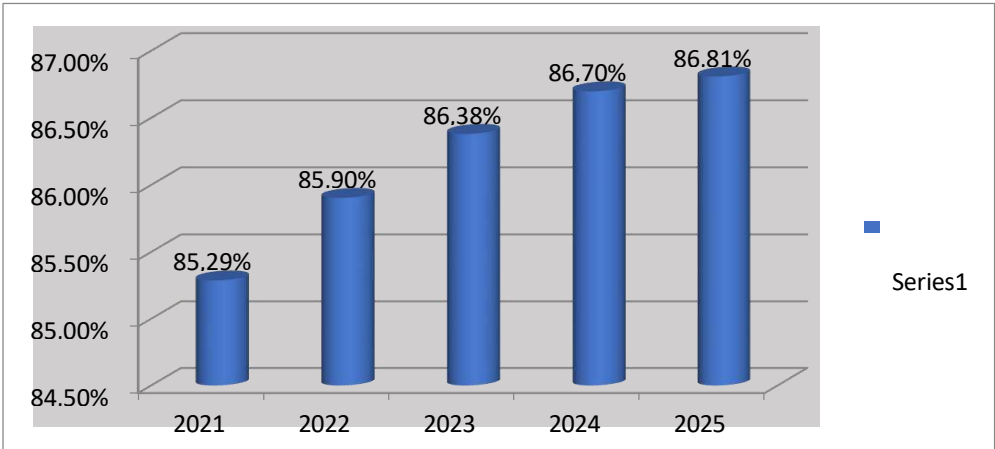
Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman yang menjadi penetapan kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

Upaya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kinerja diantaranya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan infrastruktur, percepatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, percepatan penanganan drainase permukiman, percepatan penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Adapun analisa capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan nilai rentang capaian yang terealisasi masuk dalam skala Kategori sebagai berikut:

- Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dengan nilai realisasi capaian sebesar **110,01%** masuk dalam kategori Tinggi;

Indikator Persentase Pemenuhan Sanitasi Layak dari rencana 86,79% (348.663 RT/KK) dengan jumlah rumah tangga se-Kabupaten Jombang 401.700 RT/KK sampai dengan akhir 2025 terlayani 86,81% (348.709 RT/KK) atau tercapai 100,01%. Hal ini disebabkan oleh realisasi akses sanitasi layak (400 RT/KK) yang melebihi target (446 RT/KK). Penyerapan anggaran sebesar 97,73% dari rencana pagu anggaran Rp. 7.206.792.275 terserap Rp. 7.043.505.123
Data capaian kinerja penyediaan akses sanitasi dalam 5 Tahun:

PENYEDIAAN AKSES SANITASI LAYAK S/D TAHUN 2025

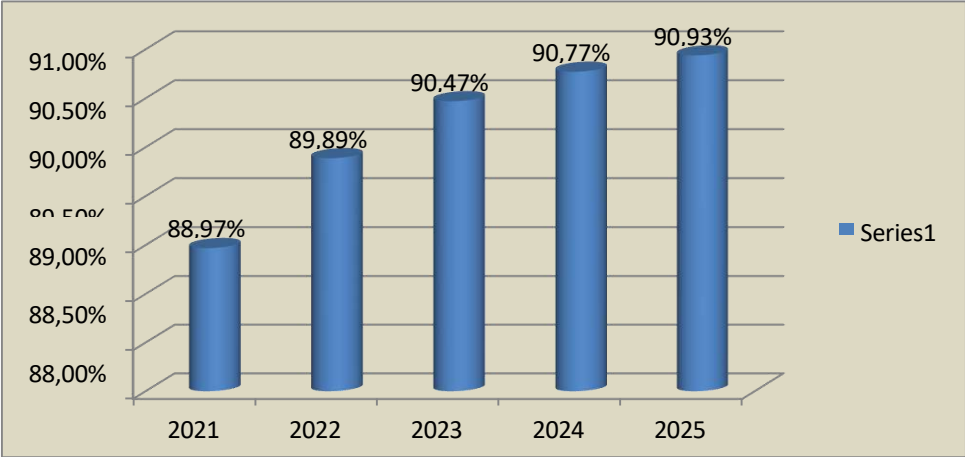


- Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dengan nilai realisasi capaian sebesar **100,04%** masuk dalam kategori Sangat Tinggi;

Indikator Persentase Pemenuhan Air Minum Layak dari rencana 90,89% (365.124 RT/KK) dengan jumlah rumah tangga se-Kabupaten Jombang 401.700 RT/KK sampai dengan akhir 2025 terlayani 90,93% (365.297 RT/KK) atau tercapai 100,05%. Hal ini disebabkan oleh realisasi akses sanitasi layak (673 RT/KK) yang melebihi target (500 RT/KK). Penyerapan anggaran sebesar 97,73% dari rencana pagu anggaran Rp. 2.721.575.643 terserap Rp. 2.619.315.178.

Data capaian kinerja penyediaan akses air minum dalam 5 tahun:

PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM LAYAK

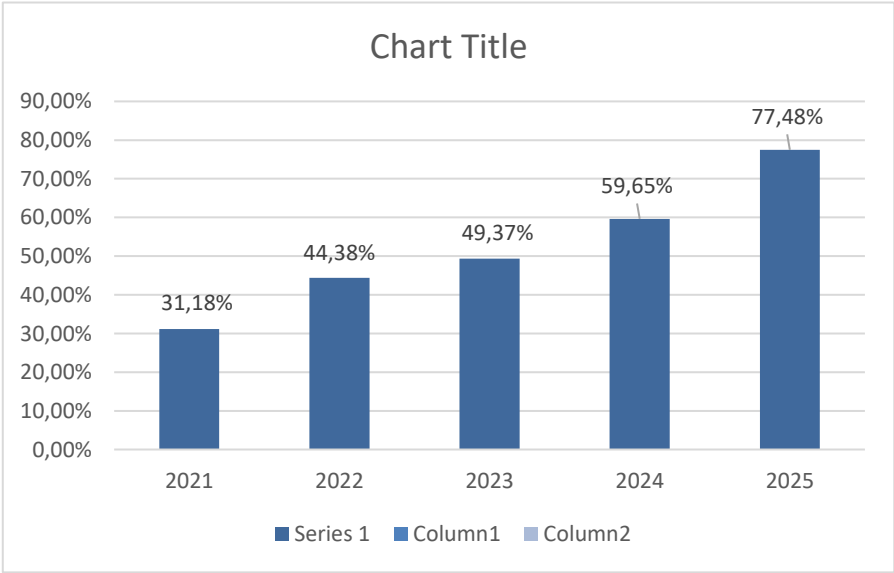


- Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik dengan nilai realisasi capaian sebesar **119,55%** masuk dalam kategori Sangat Tinggi;

Indikator persentase drainase dalam kondisi baik dengan tujuan mengurangi areal genangan terutama di kawasan perkotaan dengan rencana sampai dengan tahun 2025 adalah peningkatan jaringan drainase dengan rencana 64,81% (36.798 m') dari total panjang jaringan drainase 56.775 m kawasan perkotaan, terealisasi 77,48% (43.990 m') dengan capaian kinerja 119,55%. Penyerapan anggaran sebesar 87,69% dari pagu anggaran Rp. 8.154.686.831 terealisasi Rp.7.150.613.448.

Data kinerja jaringan drainase perkotaan dalam 5 tahun terakhir:

PENYEDIAAN JARINGAN DRAINASE PERKOTAAN

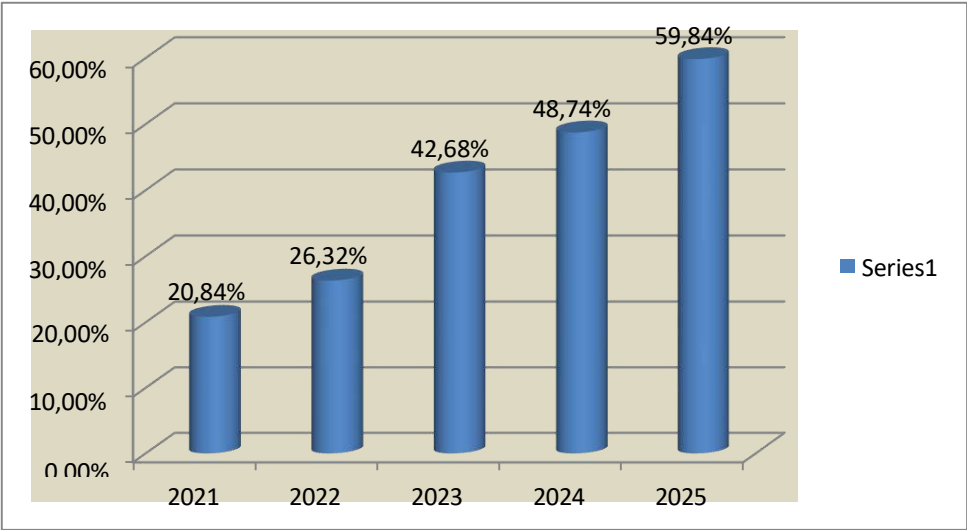


- Persentase kawasan kumuh yang tertangani dengan nilai realisasi capaian sebesar **116,01%** masuk dalam kategori Sangat Tinggi

Indikator Persentase Penanganan Kawasan Kumuh, sesuai SK BUPATI JOMBANG No:188.4.45/318/415.10.1.3/2020 tentang Kawasan Kumuh, ditetapkan luas kawasan kumuh 474.71 Ha. Target penanganan tahun 2025 sebesar 51,58% (244,48 Ha) terealisasi 59,84% (284,07 Ha), sehingga tercapai 116,02%. Penyerapan anggaran sebesar 77,22 % dari pagu Rp. 22.557.159.797 terealisasi Rp. 17.419.759.578.

Data penanganan kawasan kumuh dalam 5 (lima) tahun:

PENANGANAN KAWASAN KUMUH

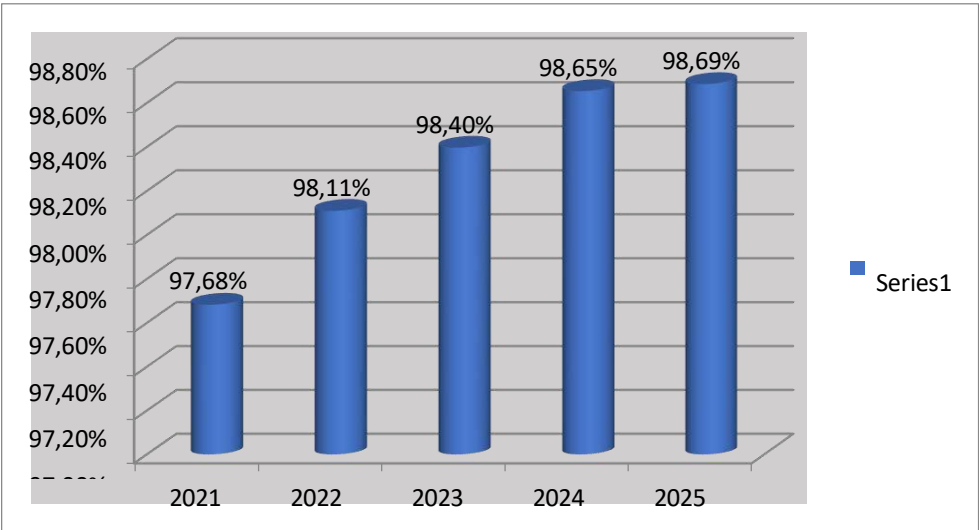


- Persentase rumah layak huni dengan nilai realisasi capaian sebesar **100,01%** masuk dalam kategori Sangat Tinggi;

Indikator Persentase Rumah Layak Huni dengan rencana sampai dengan tahun 2025 adalah 98,68% (396.394RT/KK) dari 401.700 rumah tangga di Kabupaten Jombang terealisasi 98,69% (396.422RT/KK); maka tercapai 100,01%. Penyerapan anggaran sebesar 95,00% dari pagu anggaran Rp.4.296.734.300 terealisasi Rp. 4.072.112.400.

Data kinerja rumah layak huni dalam 5 tahun terakhir:

PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI



3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun terakhir

Sasaran Strategis - Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				2022	2023	2024	2025
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERKIM SESUAI PERMENDAGRI 90							
Meningkatnya Kualitas infrastruktur Kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	85.59%	85.90%			
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	2.03%	4.18%			
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	89.22%	89.89%			
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	2.26%	8.33%			
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	42.80%	44.38%			
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi	16.89%	19.19%			
		Pesentase Penanganan kawasan kumuh	25.32%	26.32%			
	Program Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100.00%	100.00%			
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan Perkotaan	5.65%	6.93%			
		Persentase rumah layak Huni	97.93%	98.11%			
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	5.26%	8.77%			
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	10.74%	18.43%			

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	100.00%	100.00%		-		-		-
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.20%			86.38%		-		-
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	2.12%			3.38%		-		-
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90.14%			90.47%		-		-
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	2.46%			5.75%		-		-
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	48.79%			49,37%		-		-
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Tertehabillitasi	7.92%			8,96%		-		-
		Pesentase Penanganan kawasan kumuh	38.85%			42.68%		-		-
	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100.00%			100.00%		-		-
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	17.00%			22.19%		-		-
	Persentase rumah layak huni		98.36%			98.40%		-		-
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.00%			6.00%		-		-
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	13.17%			15.19%		-		-
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	100%			100%		-		-

Sasaran Strategis -	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				2022	2023	2024	2025
PERMENDAGRI 900 TAHUN 2023							
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90.57%	-	-	90.77%	-
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1.04%	-	-	3.16%	-
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.68%	-	-	86.70%	-
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	2.19%	-	-	2.33%	-
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	54.30%	-	-	55.71%	-
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Tertehabililitasi	9.74%	-	-	17.39%	-
		Pesentase Penanganan kawasan kumuh	44.29%	-	-	48.74%	-
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100%	-	-	100%	-
		Persentase rumah layak huni	98.52%	-	-	98.65%	-
	Program pengembangan perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%	-	-	100%	-
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	7.76%	-	-	16.00%	-
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.40%	-	-	6.40%	-
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	100%	-	-	100%	-

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kualitas infrastruktur sanitasi, air minum, drainase, kawasan kumuh dan hunian layak	-	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86,79%	-	-	-	86,80%
-	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	0,75%	-	-	-	0,83%
-	-	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90,89%	-	-	-	90,93%
-	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1,35%	-	-	-	1,82%
-	-	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	64,81%	-	-	-	77,48%
-	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Tertehabillitasi	12,80%	-	-	-	49,45%
-	-	Pesentase Penanganan kawasan kumuh	51,58%	-	-	-	59,84%
-	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100,00%	-	-	-	100,00%
-	-	Persentase rumah layak huni	98,68%	-	-	-	98,69%
-	Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100,00%	-	-	-	100,00%
-	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	1,85%	-	-	-	2,37%
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	7,10%				7,10%

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	-	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,92				
-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00%				100,00%

Perencanaan Dinas Perumahan dan Permukiman beracuan pada Perubahan Renstra sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (untuk dan 2022), dan perubahan renstra sesuai KEPMENDAGRI 050-5889 (kinerja tahun 2023), serta Permendagri 900 (kinerja 2024 dan 2025). Namun, tidak terdapat perbedaan program yang signifikan.

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah

Tabel 3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur sanitasi, air minum, drainase, kawasan kumuh dan hunian layak		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86,79%	86,80%	100,01%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	0,75%	0,83%	110,67%
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90,89%	90,93%	100,04%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1,35%	1,82%	134,81%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	64,81%	77,48%	119,55%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terteabilitas	12,80%	49,45%	386,33%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
		Pesentase Penanganan kawasan kumuh	51,58%	59,84%	116,01%
	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100%	100%	100,00%
		Persentase rumah layak huni	98,68%	98,69%	100,01%
	Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%	100%	100,00%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	1,85%	2,37%	128,11%
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	7,10%	7,10%	100,00%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,92	77,91	99,99%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,00%

Berdasarkan Tabel 3.1.3 diketahui bahwa tingkat kemajuan capaian renstra hingga tahun 2026, masih ada program dan indikator kinerja sasaran strategis yang belum memenuhi target renstra, namun telah memenuhi target tahunan.

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 di level nasional

Tabel 3.1.4 Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman yang Layak dan Aman Melalui Pendekatan Smart Living	89.17%	83.89%	94.08%	1) persentase rumah tangga dengan akses air minum layak memiliki capaian sebesar 95,41%; 2) persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman memiliki capaian sebesar 92,46%.
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	59.05%	58.99%	99.90%	-

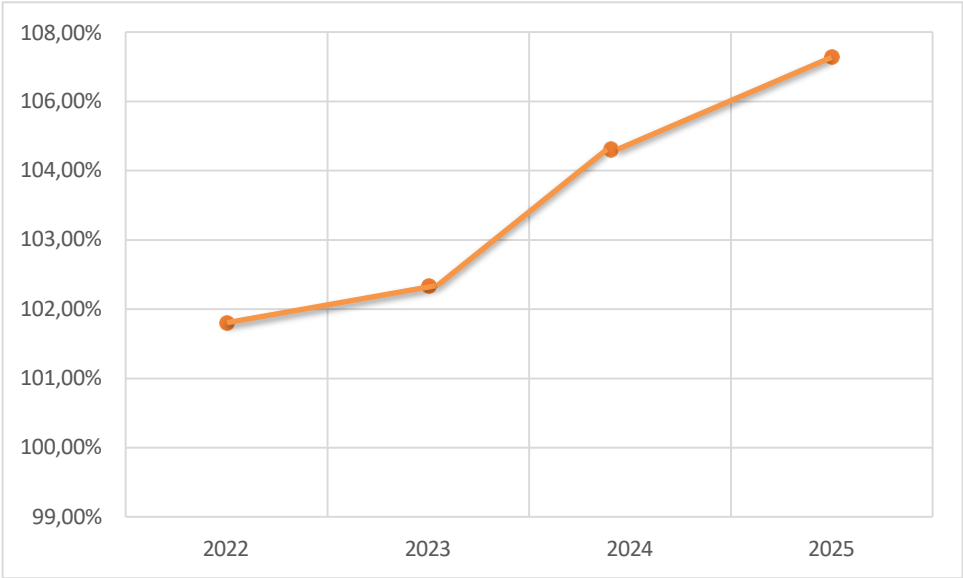
Capaian kinerja Kementrian PUPR pada kedua indicator kinerja sasaran strategis (IKSS) dibawah 100%. Kedua IKSS Kementrian PUPR tersebut sesuai dengan IKSS Dinas Perumahan dan Permukiman dengan capaian diatas 100%.

3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja menggambarkan keberhasilan dalam melaksanakan indikator utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, pada dasarnya capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 diatas 100%. Rataan capaian indicator kinerja sasaran strategis dari tahun 2022 secara berturut-turut yaitu 101,79%; 102,33%; dan 102,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman mengalami kenaikan tiap tahun.

Tabel 3.1.5.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022- 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kualitas infrastruktur sanitasi, air minum, drainase, kawasan kumuh dan hunian layak	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	100.36%	100.21%	100.02%	100,01%
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	100.75%	100.37%	100.22%	100,06%
	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	103.69%	101.19%	109.85%	122,82%
	Pesentase penanganan kawasan kumuh	103.95%	109.86%	110.05%	116,01%
	Persentase rumah layak huni	100.18%	100.04%	100.13%	100,01%
Capaian Rata-Rata		101,79%	102,33%	104,05%	107,78%



Tabel 3.1.5.2 Target Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah Warga Negara yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Warga Negara yang Terlayani	Capaian	Batas Waktu Pencapaian	Ket.
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	13 Unit (RT/KK)	13 Unit (RT/KK)	100,00%	Setiap Tahun	Dihitung per rumah tangga
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	- (RT/KK)	- (RT/KK)	-	Setiap Tahun	Relokasi dilakukan sementara dengan memfasilitasi sewa

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan anggaran

Tabel 3.2.1 Perbandingan Realisasi kinerja dan anggaran Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur sanitasi, air minum, drainase, kawasan kumuh dan hunian layak		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90,89%	90,93%	100,04%	2.721.575.643	2.619.315.178	96,24%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1,35%	1,82%	134,81%	2.721.575.643	2.619.315.178	96,24%
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86,79%	86,80%	100,01%	7.206.792.275	7.043.505.123	97,73%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	0,75%	0,83%	100%	7.206.792.275	7.043.505.123	97,73%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	12,80%	49,45%	100,00%	8.154.686.831	7.150.613.448	87,69%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Tertehabillitasi	12,80%	49,45%	386,33%	8.154.686.831	7.150.613.448	87,69%
		Pesentase Penanganan kawasan kumuh	51,58%	59,84%	116,01%	22.557.159.797	17.419.769.578	77,22%
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100,00%	100,00%	100,00%	22.557.159.797	17.419.769.578	77,22%
		Persentase rumah layak huni	98,68%	98,69%	100,01%	989.296.675	873.031.140	88,25%
	Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%	989.296.675	873.031.140	88,25%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	7,10%	7,10%	100,00%	4.296.734.300	4.072.112.400	95,00%
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6,40%	6,40%	100,00%	1.878.744.500	1.643.684.651	87,00%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,92	77,91	99,99%	7.005.640.438	6.286.922.547	89,74%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,00%	7.005.640.438	6.286.922.547	89,74%
Capaian Rataan Indikator Sasaran Strategis					105,63%	54.810.630.459	45.108.322.066	85,95%
Capaian Rataan Program					104,35%			

Pagu anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2025 yaitu Rp.54.810.630.459 dengan penyerapan anggaran Rp. 45.108.322.066 (85,95%). Capaian penyerapan anggaran tertinggi yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sanitasi layak sebesar 97,73%; sedangkan penyerapan terendah Program Pengembangan Kawasan Permukiman sebesar 77,22%. Rendahnya penyerapan diakibatkan dengan adanya penambahan anggaran pada triwulan IV 2025, namun pembebasan tanah membutuhkan waktu 6 bulan. Sehingga, anggaran tidak terserap dan akan dianggarkan pada tahun 2025 untuk relokasi korban bencana. Pagu anggaran 2025 yang terserap digunakan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagai berikut:

- 1. Melanjutkan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman, yang terdiri dari sanitasi, akses air minum, drainase, penanganan kawasan kumuh, dan rumah layak huni;
- 2. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dengan 86,79% (348.663 RT/KK) terealisasi 86,80% (348.709 RT/KK) atau tercapai 100,01%;
- 3. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dengan target 90,89% (365.124 RT/KK) terealisasi 90,93% (365.297 RT/KK) atau tercapai 100,04%;
- 4. Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik dengan target peningkatan jaringan drainase 64,81% (36.798 m) dari total panjang jaringan drainase 56.775 m kawasan perkotaan, terealisasi 77,48% (43.990 m) dengan capaian kinerja 119,55%
- 5. Target penanganan kawasan kumuh tahun 2025 sebesar 51,58% (244,86 Ha) terealisasi 59,84% (284,07 Ha), sehingga tercapai 116,01%;
- 6. Persentase rumah layak huni dengan rencana sebesar 98,68% (396.394 RT/KK) terealisasi 98,69% (396.422 RT/KK); maka tercapai 100,01%.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.2.2.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Program

Tabel 3.2.2.1 Efesiensi penggunaan Sumber daya untuk program

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Efisiensi
Meningkatnya kualitas infrastruktur sanitasi, air minum, drainase, kawasan kumuh dan hunian layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	134,81%	96,24%	28,61%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	110,67%	97,73%	11,69%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Tertehabillitasi	386,33%	87,69%	77,30%
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100,00%	77,22%	22,78%
	Program Pengembangan Perumahan	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100,00%	88,25%	11,75%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang telah di bangun	100,00%	95,00%	5,00%
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	100,00%	87,00%	13,00%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00%	89,74%	10,26%

Efisiensi diperoleh dengan menghitung selisih capaian target dengan capaian penyerapan anggaran. Nilai efisiensi program pada Dinas Perumahan dan Permukiman dari tertinggi hingga terendah yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar 77,30%; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum sebesar 28,61%; Program Kawasan Permukiman 22,78%; Program peningkatan Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 13,00%; Program Pengembangan Perumahan 11,75%; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 11,69%; Program Peningkatan Prasarana, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,26%; serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 5,00%. Sehingga masing-masing program memiliki efisiensi. Hal ini menandakan bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman bisa merealisasikan target dengan menggunakan anggaran kurang dari pagu.

3.2.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tabel 3.2.2.2 Efisiensi penggunaan Sumber daya untuk indikator				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Efisiensi
Meningkatnya kualitas infrastruktur sanitasi, air minum, drainase, kawasan kumuh dan hunian layak	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	100,04%	96,24%	3,80%
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	100,01%	97,73%	2,28%
	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	119,55%	87,69%	26,65%
	Pesentase Penanganan kawasan kumuh	116,01%	77,22%	33,44%
	Persentase rumah layak huni	100,01%	88,25%	11,76%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	99,99%	89,74%	10,25%

Efisiensi indikator kinerja sasaran strategis tertinggi hingga terendah secara berturut-turut yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 20,38 %, Pesentase Penanganan kawasan kumuh sebesar 33,44%; Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik sebesar 26,65%; Persentase rumah layak huni 11,76%; Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak 3,80%; Hal ini menunjukkan bahwa lebih rendahnya realisasi penyerapan anggaran dibandingkan capaian kinerja target, sehingga semua indikator sasaran strategis tercapai melebihi target dan terjadi efisiensi. Sehingga, rataan capaian indikator sasaran strategis yaitu 105,63% dengan penyerapan anggaran 85,95% terjadi efisiensi 18,63%.

3.2.2.3 Efisiensi Sumber Daya Manusia

Tabel 3.2.2.3 Analisis Jabatan Pegawai Tahun 2025

NO	JABATAN	KLS	B	K	SELISIH
	KEPALA DINAS	14	-	1	-1
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	12	-	2	-2
2	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	12	-	1	-1
3	Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	12	-	2	-2
	SEKRETARIS	12	1	1	-
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	Arsiparis Ahli Muda	9	0	1	1
2	Perencana Ahli Muda	9	1	1	0
3	Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
	JABATAN PELAKSANA				
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	-	3	-3
2	Penata Layanan Operasional	7	-	2	-2
3	Pengolah Data dan Informasi	6	-	1	-1
4	Pengadministrasi Perkantoran	5	-	1	-1
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET	9	1	1	-
	JABATAN PELAKSANA				
1	Arsiparis Pertama	8	0	1	-1
2	Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
3	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	3	-3
4	Penata Layanan Operasional	7	0	3	-3
5	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
6	Pengolah Data dan Informasi	6	1	7	-6
7	Arsiparis Terampil	6	0	2	-2
8	Pengadministrasi Perkantoran	5	5	10	-5
9	Operator Layanan Operasional	3	0	4	-4
10	Operator Layanan Operasional	1	0	3	-3
	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	11	1	1	-
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	2	3	-1
2	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	9	0	4	-4
3	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	8	0	9	-9
4	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	0	1	-1
5	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	0	1	-1
	JABATAN PELAKSANA				
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
2	Penata Layanan Operasional	7	1	3	-2
3	Pengelola Layanan Operasional	6	0	3	-3
4	Operator Layanan Operasional	5	0	3	-3
	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	1	1	-
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	Penata Ruang Ahli Muda	9	1	1	0
2	Penata Ruang Ahli Pertama	8	0	1	-1
3	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	2	2	0
4	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	0	2	-2
5	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	1	2	-1
6	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	10	0	2	-2
7	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	8	0	4	-4

NO	JABATAN	KLS	B	K	SELISIH
	JABATAN PELAKSANA				
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	3	-3
2	Penata Layanan Operasional	7	1	3	-2
3	Pengolah Data dan Informasi	6	0	3	-3
4	Pengelola Layanan Operasional	6	1	2	-1
5	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1
6	Operator Layanan Operasional	5	0	1	-1
	KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	11	1	1	-
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	3	3	0
2	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	0	3	-3
3	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	3	-3
	JABATAN PELAKSANA				
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	3	-3
2	Penata Layanan Operasional	7	0	3	-3
3	Pengelola Layanan Operasional	6	1	3	-2
4	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	1	2	-1
5	Operator Layanan Operasional	5	2	5	-3
	JUMLAH		29	139	108

Analisa kebutuhan Dinas Perumahan dan Permukiman pada Tahun 2025 dibutuhkan 139 orang. Namun, jumlah PNS yang ada adalah 27 orang, PPPK 2 orang sehingga selisih kebutuhan pegawai adalah 108 orang. Kekurangan pegawai ini tidak berdampak buruk pada capaian kinerja dinas. Hal ini dibuktikan dengan rataan capaian strategis 105,63% dan rataan capaian program sebesar 104,35% dengan penyerapan anggaran 83,86%. Sehingga, kekurangan pegawai tidak menghambat kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabuapten Jombang.

3.2.2.4 Efisiensi Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	RKBMD 2025				JUMLAH
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8 =3+4-5-6-7
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	-	-	-	-	1
2	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2	-	-	-	-	2
3	Tanah Bangunan Balai Sidang/ Pertemuan	2	-	-	-	-	2
4	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1	-	-	-	-	1
5	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	6	-	-	-	-	6
6	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5	-	-	-	-	5
7	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	5	-	-	-	-	5
8	Tanah Lapangan Sepak Bola	2	-	-	-	-	2
9	Tanah Lapangan Bola Volly	1	-	-	-	-	1
10	Tanah Lapangan Lainnya	1	-	-	-	-	1
11	Tanah Untuk Jalan Nasional	29	-	-	-	-	29
12	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	14	-	-	-	-	14
13	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	43	-	-	-	-	43
14	Tanah Untuk Makam Umum	1	-	-	-	-	1
15	Tanah Lapangan Taman lainnya	4	-	-	-	-	4
16	loader lainnya (dst)	1	-	-	-	-	1
17	Sumersible Pump	4	-	-	-	-	4
18	Pompa Air	4	-	-	-	-	4
19	mesin bor lainnya (dst)	1	-	-	-	-	1
20	Station Wagon	4	-	-	-	-	4
21	Pick Up	2	-	-	-	-	2
22	Sepeda Motor	24	-	-	-	-	24
23	Mobil Tinja	1	-	-	-	-	1
24	ILS. Calibration RX.	3	-	-	-	-	3
25	alat ukur universal lainnya (dst)	8	-	-	-	-	8
26	Rak-Rak Penyimpan	1	-	-	-	-	1
27	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	-	-	-	-	1
28	Lemari Besi/Metal	14	-	-	-	-	14
29	Lemari Kayu	5	-	-	-	-	5
30	Rak Besi	21	-	-	-	-	21
31	Rak Kayu	17	-	-	-	-	17
32	CCTV - Camera Control Television System	7	-	-	-	-	7
33	Alat Penghancur Kertas	2	-	-	-	-	2
34	Filing Cabinet Besi	9	-	-	-	-	9
35	Dispenser	-	-	-	-	-	-
36	Mesin Absensi	1	-	-	-	-	1
37	Meja Kerja Kayu	14	-	-	-	-	14
38	Kursi Besi/Metal	21	-	-	-	-	21
39	Kursi Besi/Metal	55	-	-	-	-	55
40	Kursi Kayu	1	-	-	-	-	1
41	Meja Rapat	1	-	-	-	-	1
42	Meja Panjang	2	-	-	-	-	2
43	Meja Kartu	1	-	-	-	-	1
44	Meja 1/2 Biro	3	-	-	-	-	3
45	Kursi Tamu	1	-	-	-	-	1
46	Kursi Biasa	40	-	-	-	-	40
47	Sofa	2	1	-	-	-	2
48	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	1	-	-	-	-	1
49	Lemari Es	1	-	-	-	-	1

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	RKBMD 2025				JUMLAH
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8 =3+4-5-6-7
50	A.C. Window	15	3	-	-	-	18
51	Televisi	1	1	-	-	-	2
52	Sound System	3	-	-	-	-	3
53	Wireless	1	-	-	-	-	1
54	Unit Power Supply	1	-	-	-	-	1
55	Tangga Aluminium	2	-	-	-	-	2
56	Handy Cam	1	-	-	-	-	1
57	Gordyin/Kray	4	-	-	-	-	4
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	-	-	-	-	4
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	-	-	1
60	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	-	-	-	-	6
61	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	-	-	-	-	11
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	35	-	-	-	-	35
63	Meja Tamu Ruangan Tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD	38	-	-	-	-	38
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	7	-	-	-	-	7
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	-	-	-	-	6
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	-	-	-	-	11
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	35	-	-	-	-	35
68	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	3	-	-	-	-	3
69	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	-	-	-	-	10
70	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	-	-	-	-	1
71	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	-	-	-	-	1
72	Camera Electronic	8	-	-	-	-	8
73	Layar Film/Projector	10	-	-	-	-	10
74	LCD Monitor	1	-	-	-	-	1
75	Camera Conference	1	-	-	-	-	1
76	Concrette Hammer Set	3	-	-	-	-	3
77	Theodolite (Peralatan Hidrologi)	1	-	-	-	-	1
78	Alat Khusus Keamanan Lainnya	12	-	-	-	-	12
79	Komputer Jaringan lainnya	1	-	-	-	-	1
80	P.C Unit	15	2	-	-	-	17
81	Lap Top	17	4	-	-	-	21
82	Hard Disk	2	-	-	-	-	2
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	3	-	-	-	32
84	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	-	-	-	-	3
85	External	10	-	-	-	-	10
86	Server	1	-	-	-	-	1
87	Peralatan Komputer lainnya	1	-	-	-	-	1
88	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	-	-	-	-	2
89	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	-	-	-	-	2
90	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	7	-	-	-	-	7
91	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	5	-	-	-	-	5
92	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	-	-	-	-	1
93	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	3	-	-	-	-	3
94	Taman Permanen	11	-	-	-	-	11
95	Taman lainnya	5	-	-	-	-	5
96	Makam Bersejarah	6	-	-	-	-	6
97	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	7	-	-	-	-	7
98	Jalan Kabupaten Lokal	2	-	-	-	-	2

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	RKBMD 2025				JUMLAH
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8 =3+4-5-6-7
99	Jalan Kabupaten Lain-lain	5	-	-	-	-	5
100	Jalan Desa	650	3	-	-	-	653
101	Jalan Desa Lain-lain	4	-	-	-	-	4
102	Jalan Khusus Kompleks	589	-	-	-	-	589
103	Jalan Khusus Lainnya	4	-	-	-	-	4
104	Jembatan Pada Jalan Desa	6	2	-	-	-	8
105	Jembatan Gantung	3	-	-	-	-	3
106	Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah Ban	1	-	-	-	-	1
107	Bangunan Waduk a Lain-lain	1	-	-	-	-	1
108	Saluran Pasang Tertutup/Terowongan	4	-	-	-	-	4
109	Bangunan Pembawa Irigasi Lain- lain	1	-	-	-	-	1
110	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	5	-	-	-	-	5
111	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	1	-	-	-	-	1
112	Bangunan Saluran lain-lain	3	-	-	-	-	3
113	Saluran Drainage	822	3	-	-	-	825
114	Bangunan Pelimpah Banjir	1	-	-	-	-	1
115	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	1	-	-	-	-	1
116	Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air	1	-	-	-	-	1
117	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	18	-	-	-	-	18
118	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	35	-	-	-	-	35
119	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	6	-	-	-	-	6
120	Saluran Pengumpul Air Hujan	1	-	-	-	-	1
121	Bangunan Waduk Air Kotor Lain-lain	1	-	-	-	-	1
122	Bangunan Pembuang Air Kotor Lain-lain (dst)	29	2	-	-	-	31
123	Bangunan Pompa Air Hujan	1	-	-	-	-	1
124	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	1	-	-	-	-	1
125	Penampungan Air Hujan (PAH)	2	-	-	-	-	2
126	Sumur Gali (SGL)	5	-	-	-	-	5
127	Sumur Resapan	43	-	-	-	-	43
128	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)	1	-	-	-	-	1
129	Instalasi Air Kotor Lain-lain	1	-	-	-	-	1
130	Instalasi Gardu Listrik distribusi Lain-lain	1	-	-	-	-	1
131	Jaringan Pembawa Lain-lain	35	8	-	-	-	43
132	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	1	-	-	-	-	1
133	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	5	-	-	-	-	5
134	Buku Umum Lain-lain	1	-	-	-	-	1
135	Bola Dunia (Globe)	1	-	-	-	-	1
136	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	19	-	-	-	-	19
JUMLAH		3,062	32	-	-	-	3,093

Dari table diatas, diketahui bahwa jumlah PC sebanyak 15 unit dan laptop 17 unit. Jumlah PNS Dinas Perumahan dan Permukiman sebanyak 27 orang, 2 orang PPPK dan 18 tenaga PPPK Paruh Waktu. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan PC ataupun laptop untuk menunjang pekerjaan. Namun, kekurangan sarpras kantor ini tidak menyebabkan kegagalan dinas dalam mencapai target tahunannya.

Tabel 3.2.2.5 Perbandingan Sarpras Kantor dengan Anjab dan Capaian Kinerja

SARPRAS BMD		ANJAB			TENAGA ADMINISTRASI PPPK Paruh Waktu	CAPAIAN KINERJA 2025
PC	LAPTOP	B	K	SELISIH		
15 Unit	17 Unit	29 orang	139 orang	108 orang	18 orang	102,60%

Sarpras kantor untuk menunjang pekerjaan berupa PC dan laptop sebanyak 32 unit belum mencukupi kebutuhan administrasi untuk 26 orang PNS, 2 orang PPPK dan 18 orang PPPK Paruh Waktu Dinas Perumahan dan Permukiman. Sehingga, diupayakan dengan melakukan pengadaan pada tahun anggaran tahun 2025 sebanyak 2 unit PC dan 4 unit laptop. Capain kinerja dinas dapat melebihi target tahunannya yaitu 105,63% dengan penyerapan anggaran 83,86% dan terjadi efisiensi 21,77%. Hal ini menunjukkan bahwa dinas dapat bekerja dengan optimal meskipun masih kekurangan pegawai dan sarpras kantor.

3.3 Analisis Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berdasarkan hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2025, mengalami kenaikan saat perubahan anggaran, sehingga terdapat beberapa program/kegiatan yang mengalami penyempurnaan. Berikut ini identifikasi penyebab kenaikan dan penurunan kinerja Tahun 2025 yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman:

a. Penyebab peningkatan kinerja pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- 1. Koordinasi yang dilaksanakan kepada SKPD lain/pihak-pihak terkait pada awal tahun;
- 2. Telah tersusunya Program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung menyentuh ke masyarakat;
- 3. Memprioritaskan program/kegiatan yang mendukung indikator kinerja dinas;
- 4. Adanya kegiatan *supporting*/pendukung lain seperti berkadang;
- 5. Memaksimalkan upaya pembiayaan dari anggaran APBN

b. Penyebab penurunan kinerja pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Program kegiatan yang dilaksanakan terkendala dengan koordinasi yang berkaitan dengan kewenangan PD lain;
- 1. Penyederhanaan nomenkatur terkait dengan keterbatasan angagarn perjalanan dinas dan penunjang lain yang sangat diperlukan untuk koordinasi kegiatan dengan pusat dan propinsi;
 - 2. Terkait urusan yang belum terfokus pada satu PD, misalkan Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Urusan Pekerjaan Umum yang seharusnya sudah berada di PD lain;
 - 3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tidak bisa dilaksanakan misalnya perubahan nama penerima bantuan yang tidak sesuai *database*.

3.4 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 dilaksanakan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Tujuan dari PUG pada program ini adalah untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dan daya dukung air baku bagi perempuan, anak dan kaum rentan. Berikut adalah analisis situasi PUG di Dinas Perumahan dan Permukiman:

Tabel 3.4.1 Analisis Situasi PUG Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025

PROGRAM/SUB KEGIATAN		ANALISIS SITUASI	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Cakupan layanan air bersih diperdesaan yang belum terlayani 9,53%
		2	Isu kesenjangan gender
		1	Faktor Kesenjangan
		1	Perempuan dalam Pengelolaan dan pengembangan jaringan SPAM masih rendah dan laki laki lebih Dominan
		2	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di perdesaan utamanya kaum perempuan
		3	Pengambil keputusan pengelolaan SPAM masih didominasi Laki laki
		4	Masih sulitnya mendapat air bersih karena belum terbangunnya Akses perpipaan / SR
		5	Wanita membutuhkan waktu lebih banyak
		6	Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat
		2	Penyebab Kesenjangan Internal
		1	Rendahnya keterlibatan perempuan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Sarana air bersih
		2	Masih rendahnya keterlibatan wanita pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengadaan sarpras air bersih
		3	Adanya keterbatasan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih
		3	Penyebab Kesenjangan Eksternal
		1	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih
		2	Masih terbatasnya akses dan sarana serta prasarana air bersih
	3	Masih terbatasnya area pelayanan air bersih diperdesaan	

Adanya kesulitan mendapatkan air bersih di pedesaan terutama masyarakat berpenghasilan rendah menunjukan bahwa penggunaan air bersih lebih didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki, mengingat kebutuhan domestik/rumah tangga terhadap air bersih sangat tinggi (memasak, mencuci, mengepel, dll). Belum terbangunnya pipanisasi air bersih di pedesaan, akan menyebabkan kesulitan bagi perempuan untuk mendapatkan air bersih karena harus mengambil air di lokasi sumber air (mata air) dengan jarak cukup jauh dari rumah tinggal. Sehingga, perempuan membutuhkan waktu lebih banyak untuk mengambil air bersih di lokasi sumber air dan menyebabkan ketidakmudahan dan ketidaknyamanan bagi perempuan, serta mengganggu aktivitas rumah tangga.

Total anggaran pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp. 2.721.575.643 dengan realisasi Rp. 2.629.907.106 Keterkaitan PUG pada target program ini adalah selain meningkatnya cakupan pelayanan air bersih sebesar 3,16% (673 RT/KK), juga untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dan daya dukung air baku bagi kaum rentan, anak-anak dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.

Realisasi target Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota adalah 400 RT/KK (1,04%) dengan capaian 100,06% Sehingga, diharapkan dapat memudahkan kaum rentan, anak dan perempuan dalam beraktivitas sehari-hari tanpa perlu mengambil air dari sumber mata air.

Tindak lanjut hasil capaian kinerja Pengarusutamaan Gender:

Akan diupayakan untuk semua kegiatan teknis Dinas Perumahan dan Permukiman harus mengacu dan berdampak pada Pengarusutamaan Gender baik perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatannya.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dalam menyusun laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja sesuai sasaran strategis organisasi, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta analisis capaian kinerjanya.

Capaian kinerja tahun 2025 tersebut rata-rata mencapai 105,603% Komitmen internal dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang menjadi lebih baik.

4.1 Permasalahan

Berikut adalah hambatan yang terjadi pada Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2025, yaitu:

1. Jumlah pegawai yang kurang memenuhi sesuai kebutuhan operasional dinas masih kurang dengan cakupan kinerja se-Kabupaten Jombang;
2. Masih tingginya rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah 5.406 RT/KK (1,35%);
3. Masing tingginya rumah tangga dengan sanitasi belum layak di Kabupaten Jombang sebanyak 53.437 RT/KK (13,30%) membutuhkan strategi penanganan yang mengedepankan skala prioritas karena merupakan kebutuhan dasar, sedangkan kemampuan cakupan penanganan sangat terbatas;
4. Daerah rawan air bersih yang telah ditetapkan yaitu 8 kecamatan, 5 di utara Brantas dan 3 di luar utara Brantas yang membutuhkan penanganan yang berbeda satu sama lain misalkan di utara Brantas kondisi sumber air yang sangat terbatas untuk eksplorasi membutuhkan tenaga ahli geolistik khusus untuk menentukan, serta banyaknya infrastruktur yang cenderung menutup resapan air seperti bannyaknya bangunan dan jalan tidak menyediakan lahan resapan;
5. Semakin tinggi debit air yang masuk di drainase perkotaan karena semakin berkurangnya lahan resapan perkotaan;
6. Masih tingginya areal kawasan kumuh sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor:188.4.45/ 318 /415.10.1.3/2020 tanggal 7 September 2020 dengan luas 474.71 Ha, 9 kecamatan dan 37 desa.

4.2 Rekomendasi

Dari beberapa masalah yang dijabarkan pada sub bab 4.1, kami menyarankan solusi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai agar dapat melaksanakan tupoksi dengan maksimal;
2. Diupayakan penyediaan RTLH untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan pembiayaan APBN jika APBD kurang mendukung dengan skala prioritas;
3. Laksakan pendataan dan inventarisasi kondisi PSU sehingga bisa diprioritaskan perumahan yang memang membutuhkan pemeliharaan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengurangi kesenjangan penyediaan sanitasi.

Jombang, 31 Desember 2025

Pt KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JOMBANG



SYAIFUL ANWAR, ST. ME.
Pembina Tk. I
NIP. 197803192005011015